

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUUL BAHASA INDONESIA.....	i
HALAMAN JUDUL BAHASA INGGRIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
ABSTRACT	xvii
INTISARI.....	xviii

BAB 1	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tinjauan Pustaka	5
1.4 Kerangka Teori	10
1.4.1 Rezim Internasional	10
1.4.2 Teori Kepatuhan	14
1.5 Hipotesa	17
1.6 Metode Penelitian.....	18
1.7 Sistematika Penulisan	19
BAB II KOVENAN EKOSOB SEBAGAI INSTRUMEN HAM	
INTERNASIONAL	21
2.1 Latar Belakang Lahirnya ICESCR.....	21
2.2 Dimasukkannya Hak Perburuhan Dalam ICESCR	27
2.3 ICESCR Sebagai Instrumen HAM Internasional.....	29
2.4 Isi ICESCR	32

2.5. Hak Perburuhan Dalam ICESCR34

**BAB III TINGKAT KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP HAK
PERBURUHAN YANG TERCANTUM DALAM ICESCR.....37**

3.1 Latar Belakang Indonesia Meratifikasi ICESCR37

3.2. Kewajiban Pemerintah Indonesia.....40

3.2.1 Reformasi Hukum Berlandaskan ICESCR40

3.2.2 Sosialisasi ICESCR40

3.2.3 Pelaporan Pencapaian Pelaksanaan Hak Ekosob41

3.2.4. Menjamin Pelaksanaan Hak-Hak Di Dalam ICESCR.....41

3.3 Implentasi Hak Perburuhan Yang Tercantum Dalam ICESCR43

3.4. Implementasi Hak Atas Upah Yang Layak45

3.4.1. Regulasi Pengupahan Di Indonesia45

3.4.2. Tingkat Kepatuhan Atas Pelaksanaan UMP48

3.4.3. Politik Upah Murah52

3.5. Implementasi Hak Kebebasan Berserikat60

3.5.1. Regulasi Serikat Pekerja/Buruh.....60

3.5.2. Kelenturan Pasar Kerja Fleksibel dan Union Busting	62
3.5.3. Melucuti Kebebasan Serikat Pekerja/Buruh	68
3.6. Implementasi Hak Mogok	71
3.6.1 Regulasi Hak Mogok	71
3.6.2. Akibat Hukum Mogok	75
BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN	
INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI ICESCR.....	79
4.1 Ambiguity and Indeterminacy	79
4.1.1 Ambiguitas Dalam Isi Perjanjian.....	79
4.1.2 Ambiguitas Dalam Hukum Nasional.....	85
4.2. Limitation on the Capacities of the Parties	91
4.2.1. Keterbatasan Sumber Daya Ekonomi	91
4.2.2. Keterbatasan Wewenang	104
4.2.3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia	107
4.2.4. Keterbatasan Kapasitas Birokrasi dan Penegakan Hukum	112
4.3. Temporal Dimension	123



BAB V KESIMPULAN.....125

DAFTAR PUSTAKA.....130

LAMPIRAN